

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam sistem demokrasi, proses pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif merupakan syarat penting yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara demokrasi lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan sebesar 30%, partai politik diharuskan memenuhi persyaratan *affirmative action* yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 30% kandidat perempuan dalam pemilu 2024.

Penelitian ini menggunakan teori *supply-demand* yang dikembangkan oleh Pippa Norris dan Joni Lovenduski sebagai pisau analisis untuk mengetahui pola rekrutmen politik dalam memilih calon legislatif perempuan yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tangerang pada pemilu tahun 2024. Teori ini mengidentifikasi empat aspek *supply* sumber daya yang penting, yaitu keuangan, waktu, pengalaman organisasi, dan jaringan pendukung yang dijadikan sebagai dasar analisis. Di sisi lain, *demand* ini mencakup faktor internal dari partai dalam memilih calon legislatif perempuan yang dianggap mampu atau sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh partai.

Di PKS Kabupaten Tangerang, pola rekrutmen calon legislatif perempuan bersifat tertutup. Pola ini mengharuskan caleg perempuan harus berasal dari kader internal partai dan menjalani proses seleksi internal yang ketat, termasuk menyelesaikan semua tahapan pengkaderan. Dari sisi *supply*, terdapat perbedaan signifikan dalam latar belakang sosial, waktu, keuangan, pekerjaan, dan pengalaman politik antara calon legislatif laki-laki dan perempuan. Caleg laki-laki memiliki pengalaman politik sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2019, sedangkan caleg perempuan yang diusulkan oleh PKS Kabupaten Tangerang pada Pemilu tahun 2024 tidak ada yang pernah menjadi anggota legislatif atau incumbent. Namun, dari sisi *demand* atau permintaan internal PKS, terdapat harapan bahwa caleg perempuan harus memiliki reputasi baik di masyarakat untuk meraih suara pemilih serta memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk

mendukung kampanye secara maksimal melalui kegiatan sosial di daerah pemilihan masing-masing.

Selain itu, masih terdapat diskriminasi caleg perempuan dalam kebijakan internal partai politik seperti sistem blok dalam kampanye dan penomoranurut. Bapilu PKS Kabupaten Tangerang cenderung mendukung kandidat yang mempunyai nama populer di daerahnya untuk dijadikan nomor urut 1. Pada Dapil 1 hingga 6, kecuali Dapil 5, nomor urut 1 hanya diberikan kepada calon laki-laki yang sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2019 atau pengurus internal partai. Selain itu, terdapat sistem blok dalam kampanye, seperti yang dialami oleh Nurul Amalia di Dapil 5 yang meliputi wilayah Curug, Cikupa, dan Panongan. Dia tidak diperbolehkan berkampanye di wilayah Curug karena wilayah tersebut merupakan area kampanye caleg lain.

Akibatnya, dalam rekrutmen politik pada pemilu PKS Kabupaten Tangerang tahun 2024, perempuan dengan sumber daya terbatas tidak mampu bersaing secara adil dengan kandidat lain, terutama para incumbent. Selain itu, kebijakan kuota 30% dan sistem proporsional terbuka menjadi faktor penting dalam memarginalisasi perempuan, yang sering kali hanya dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Dengan demikian, preferensi yang kuat terhadap caleg laki-laki incumbent semakin mempersempit peluang bagi caleg perempuan untuk berhasil terpilih dalam pemilu.

V.2 Saran

V.2.1 Saran Praktis

Peneliti memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperbaiki pola rekrutmen dalam penjurangan calon legislatif perempuan. PKS perlu mengubah pendekatan rekrutmen dengan meningkatkan upaya lobi dan negosiasi dengan keluarga caleg perempuan yang ditunjuk. Hal ini untuk memastikan calon perempuan yang berpotensi tinggi tetap dapat maju dalam pemilihan, mengingat mereka memiliki popularitas dan dukungan tinggi dari masyarakat.

Struktur kekuasaan dalam DPD PKS Kabupaten Tangerang masih cenderung patriarki yang menguatkan dominasi laki-laki dan meminggirkan perempuan. Untuk itu, partai harus menciptakan sistem yang lebih inklusif dan mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. PKS perlu mengatasi ketimpangan gender dengan membuat perubahan struktural dalam sistem kampanye dan rekrutmen termasuk memastikan bahwa sistem penomoranurut dan kampanye lebih adil dan tidak bias gender, sehingga perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam politik.

Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun jaringan dukungan yang kuat, mengubah pola rekrutmen menjadi terbuka agar caleg perempuan yang diusung memiliki peluang lebih besar untuk menjadi anggota legislatif dan memberikan insentif yang lebih substansial. Dengan langkah-langkah ini, PKS dapat membantu perempuan mengatasi hambatan yang sering mereka hadapi dalam proses pemilihan internal dan umum.

V.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori *supply and demand* yang dikembangkan oleh Pippa Norris dan Joni Lovenduski untuk menganalisis pola rekrutmen politik dalam menentukan caleg perempuan yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tangerang dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan studi tentang rekrutmen partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola rekrutmen yang diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan di Kabupaten Tangerang untuk Pemilu 2024 menggunakan teori *supply* untuk melihat penawaran dari caleg perempuan dan *demand* untuk melihat permintaan dari partai politik untuk caleg perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika internal partai dalam merekrut calon legislatif perempuan dan bagaimana kebijakan serta praktik rekrutmen dapat ditingkatkan untuk

mendukung keterwakilan gender yang lebih baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi PKS, tetapi juga bagi partai politik lain yang ingin memperbaiki pola rekrutmen mereka dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.